

PENGHITUNGAN BIAYA SATUAN PENDIDIKAN SMA NEGERI 1 PURWOKERTO

CALCULATION OF THE EDUCATIONAL UNIT COST AT STATE HIGH SCHOOL 1 PURWOKERTO

Oleh: **Liasari Nurfauzia**

Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta

liasari.nf@gmail.com

Abdullah Taman

Staf Pengajar Jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya biaya satuan pendidikan pada SMA Negeri 1 Purwokerto. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara. Subjek penelitian adalah Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah. Objek dalam penelitian ini adalah biaya satuan pendidikan siswa SMAN 1 Purwokerto tahun ajaran 2015/2016. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa biaya satuan pendidikan pada siswa SMAN 1 Purwokerto adalah 1) siswa kelas X sebesar Rp.10.101.573,00 per tahun dan Rp.841.798,00 per bulan, 2) siswa kelas XI sebesar Rp.11.527.103,00 per tahun dan Rp.960.592,00 per bulan, 3) siswa kelas XII sebesar Rp.13.079.946,00 per tahun dan Rp.1.089.996,00 per bulan, 4) siswa program MIA sebesar Rp.6.837.909,00 per tahun dan Rp.569.826,00 per bulan, 5) siswa program Sosial sebesar Rp.16.380.504,00 per tahun dan Rp1.365.042,00 per bulan, 6) siswa program MIA-Akselerasi sebesar Rp.155.345.019,00 per tahun dan Rp.12.945.418,00 per bulan.

Kata kunci : biaya satuan, biaya satuan pendidikan, *Activity Based Costing*.

Abstract

The purpose of this research was to evaluate the educational unit cost at State High School 1 Purwokerto. This research was a descriptive research with quantitative approach. The data collection method that used was documentation and interviews. The subject of this study was Principal and Treasurer of State High School 1 Purwokerto. The object of this study was the educational unit cost students of State High School 1 Purwokerto in the academic year 2015/2016. The data analysis that used was quantitative descriptive. Research result showed that the educational unit cost students at State High School 1 Purwokerto are 1) 10th grade students was Rp.10.101.573,00 per year and Rp.841.798,00 per month, 2) 11th grade students was Rp.11.527.103,00 per year and Rp.960.592,00 per month, 3) 12th grade students was Rp.13.079.946,00 per year and Rp.1.089.996,00 per month, 4) The Science Programme students was Rp.6.837.909,00 per year and Rp.569.826,00 per month, 5) The Social Programme students was Rp.16.380.504,00 per year and Rp1.365.042,00 per month, 6) The Accelerations-Science Programme Rp.155.345.019,00 per year and Rp.12.945.418,00 per month.

Keywords : unit cost, educational unit cost, *Activity Based Costing*.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan asasi yang dibutuhkan oleh setiap manusia dan kewajiban yang harus diemban oleh negara agar dapat membentuk masyarakat yang memiliki pemahaman dan kemampuan untuk menjalankan fungsi-fungsi kehidupan selaras dengan fitrahnya serta mampu mengembangkan kehidupannya menjadi lebih baik dari masa ke masa. Para *founding fathers* sadar sepenuhnya bahwa untuk membebaskan bangsa Indonesia dari kungkungan kebodohan dan kemiskinan, jalan satu-satunya adalah dengan pendidikan. Kesadaran tersebut dituangkan dalam rumusan Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa salah satu tujuan pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya, pada pasal 31 UUD 1945 lebih tegas lagi menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Namun saat ini tingkat pendidikan Indonesia dinilai masih rendah dibandingkan dengan negara lainnya. Data yang didapat dari *Education For All (EFA) Global Monitoring Report 2000-2015* yang dikeluarkan oleh UNESCO mencatat Indeks Pembangunan Pendidikan atau *Education Development*

Index (EDI) berdasarkan data tahun 2015 adalah 0,937. Nilai itu menempatkan Indonesia di posisi ke-68 dari 113 negara. Pada tahun 2012, Lembaga *Programme for International Study Assessment (PISA)*, menyatakan bahwa Pendidikan Indonesia masuk dalam peringkat 64 dari 65 negara yang diteliti. Survey lainnya yang dilakukan oleh *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* tahun 2015, Indonesia menduduki posisi nomor 69 dari 76 negara survey. Bahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menyebut kondisi pendidikan Indonesia saat ini sedang dalam kondisi gawat darurat, melihat beberapa data mengenai hasil buruk yang dicapai dunia pendidikan Indonesia pada beberapa tahun terakhir.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, Pemerintah memberlakukan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana pemerintah pusat dan daerah diharuskan mengalokasikan minimal dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. Upaya lainnya untuk

menciptakan pendidikan yang memadai di suatu sekolah telah dijabarkan ke dalam sejumlah Peraturan Pemerintah, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menjelaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan meliputi: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Beberapa indikator yang menentukan kualitas mutu sekolah sebagai *input* antara lain siswa, kurikulum, sarana prasarana, biaya, pengelolaan, dan lingkungan.

Biaya pendidikan merupakan komponen sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dapat dikatakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan melancarkan kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan. Indra Bastian (2007) menyatakan bahwa biaya pendidikan adalah suatu bentuk pengorbanan ekonomis yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara umum, terutama mencetak kualitas pribadi lulusan sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yayasan, maupun entitas sekolah itu sendiri.

Menurut Nanang Fattah (2008) biaya pendidikan ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain: besar kecilnya institusi pendidikan, jumlah siswa, tingkat gaji tenaga kependidikan, tingkat pertumbuhan penduduk dan perubahan kebijakan.

Biaya pendidikan dapat berasal dari bermacam-macam sumber. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 46 dijelaskan bahwa Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Hal itu mengindikasikan bahwa pendanaan pendidikan tidak hanya dari satu sumber yaitu Pemerintah Pusat tetapi perlu adanya partisipasi dukungan dari Pemerintah Daerah serta Masyarakat.

Sebagai usaha untuk memenuhi UU No. 20 Tahun 2003, Pemerintah mulai mengeluarkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SMA dan SMK. Dana yang dikeluarkan untuk Sekolah Menengah Atas dikenal dengan nama BOS SMA. Dalam Petunjuk Teknis (Juknis) BOS SMA, BOS SMA adalah program pemerintah berupa pemberian dana langsung kepada SMA negeri dan swasta. Salah satu tujuan BOS SMA yaitu membantu biaya operasi nonpersonalia sekolah. Besaran dana BOS yang diterima dihitung berdasarkan jumlah siswa

masing-masing sekolah dan satuan biaya (*unit cost*) bantuan. Di tahun 2015, satuan biaya BOS SMA sebesar Rp1.200.000,00/siswa/tahun dimana untuk penyaluran periode Januari-Juni sebesar Rp600.000,00/siswa sedangkan periode Juli-Desember sebesar Rp600.000,00/siswa.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Non Personalialia Tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) tercantum besaran biaya nonpersonalialia per sekolah/per program keahlian. Berikut tabel standar Biaya Operasi Nonpersonalialia untuk Program Keahlian Ilmu Alam (IPA) dan Ilmu Sosial (IPS) di DKI Jakarta tahun 2009:

Tabel 1. Standar Biaya Operasi Nonpersonalialia SMA Per Tahun Per Sekolah di DKI Jakarta Tahun 2009

No	Program Keahlian	Biaya Nonpersonalialia (Rp)	Operasi
1	SMA IPA	184.320.000	
2	SMA IPS	193.920.000	

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 Standar Biaya Operasi Nonpersonalialia Kabupaten Banyumas diperoleh dengan mengalikan Biaya Operasi Nonpersonalialia DKI Jakarta dengan indeks biaya pendidikan Kabupaten Banyumas yaitu sebesar 0,911. Berikut tabel standar Biaya Operasi Nonpersonalialia Kabupaten Banyumas:

Tabel 2. Standar Biaya Operasi Nonpersonalialia Per Tahun Per Sekolah Kabupaten Banyumas

No	Program Keahlian	Biaya Nonpersonalialia (Rp)	Operasi
1	SMA IPA	176.661.000	
2	SMA IPS	167.916.000	

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009

Hasil survey di SMAN 1 Purwokerto menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran keuangan di sekolah saat ini masih menggunakan cara yang tradisional, yaitu dana hanya berdasarkan pada kegiatan yang akan dilakukan. Cara yang masih tradisional memungkinkan dana yang digunakan tidak tepat sasaran dan terserap secara keseluruhan. Hal ini mengakibatkan biaya pendidikan yang dibebankan kepada siswa melalui biaya Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) menjadi tidak akurat. Fakta lain yaitu pembebanan biaya per siswa tingkat SMA selama ini masih disamaratakan, baik itu program

IPA, IPS, maupun Akselerasi. Padahal kebutuhan tiga program tersebut berbeda. Hasil survey di SMAN 1 Purwokerto juga menunjukkan untuk biaya SPP baik program IPA dan IPS dibebankan biaya SPP yang sama yaitu sebesar Rp250.000,00 per siswa sedangkan program Akselerasi dibebankan biaya SPP sebesar Rp500.000,00.

SMAN 1 Purwokerto sebagai sekolah berstatus negeri harus menerapkan tata kelola yang baik (*good governance*) pada setiap aktivitasnya. Dalam *good governance* terdapat dua pilar utama yaitu akuntabilitas dan transparansi yang menjadi dasar dalam membuat dan menyajikan laporan pengelolaan keuangan sekolah yang memuat informasi biaya baik kepada pemerintah maupun masyarakat. Penyajian informasi biaya bisa dilakukan apabila manajemen dapat mengidentifikasi biaya-biaya yang digunakan untuk melakukan kegiatan. Oleh karena itu, kebijakan mengenai biaya-biaya yang dibuat sekolah tertuang dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS). RKAS memuat informasi biaya-biaya yang akan dikeluarkan sekolah beserta sumber-sumber yang mendanai biaya tersebut. RKAS juga digunakan sebagai dasar dalam menghitung Biaya Satuan Pendidikan

Biaya Satuan Pendidikan (*unit cost*) perlu diperhitungkan oleh sekolah. Perhitungan biaya pendidikan dapat memperlihatkan berapa biaya yang ditanggung oleh masing-masing peserta didik, baik yang bersumber dari pemerintah sebagai bantuan operasional untuk peserta didik maupun dari personal. Agar perhitungan biaya pendidikan dapat menghasilkan biaya yang rinci dan transparan serta dapat digunakan sebagai informasi untuk mengambil keputusan, diperlukan suatu metode perhitungan yang tepat, salah satunya adalah dengan metode *Activity Based Costing*.

Metode *Activity Based Costing* ini terkenal dengan banyak manfaat dan keuntungan, salah satunya adalah dapat menekan jumlah biaya dalam suatu organisasi. Hal tersebut bisa terjadi karena pada metode *Activity Based Costing* ini perhitungannya menekankan pada aktivitas sebagai objek biaya dasar. *Activity Based Costing* dibuat dengan keyakinan dasar bahwa biaya hanya dapat dikurangi secara signifikan melalui penyebab timbulnya biaya, yaitu aktivitas.

Biaya Satuan Pendidikan per peserta didik menggambarkan secara rinci atas beban peserta didik selama mengikuti pendidikan di sekolah. Beban unit tiap peserta didik akan dibandingkan dengan subsidi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat sehingga diketahui

jumlah beban yang akan ditanggung peserta didik. Untuk mencapai hal tersebut, akuntabilitas keuangan suatu lembaga pendidikan menjadi sebuah tuntutan. Sekolah dituntut untuk dapat mengkomunikasikan secara transparan dan terbatas atas biaya penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menilai dan mengevaluasi kinerja keuangan sekolah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa Biaya Satuan Pendidikan (*unit cost*) per peserta didik per tahun SMAN 1 Purwokerto dengan menggunakan metode *Activity Based Costing*.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap makna yang terkandung di dalam data yang telah dikumpulkan. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mendapatkan besaran angka dan memaparkan hasil penghitungan Biaya Satuan Pendidikan per peserta didik.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Purwokerto yang beralamat di Jalan Gatot Soebroto No.

73 Purwokerto. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni - Agustus 2016.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah SMAN 1 Purwokerto dan Bendahara Sekolah. Sedangkan objek penelitiannya adalah biaya satuan pendidikan siswa SMAN 1 Purwokerto.

Data dan Teknik Analisis Data

a. Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dokumentasi dan wawancara. Kegiatan dokumentasi yang dilakukan yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen yang terkait dengan pembiayaan di sekolah. Dokumen yang dikaji antara lain data jumlah siswa, data jumlah tenaga kependidikan, data sarana prasarana, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS). Metode wawancara digunakan untuk mengumpulkan data mengenai manajemen keuangan dan sumber pembiayaan di sekolah. Narasumber yang diwawancara adalah pihak yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah, yaitu Bendahara Sekolah.

b. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan perhitungan *unit cost* dengan metode *Activity Based Costing*, prosedur pembebanan biaya overhead melalui dua tahapan, yaitu:

- 1) Tahap Pertama
 Pengumpulan biaya ke dalam *cost pool* yang memiliki aktivitas yang sejenis atau homogen, terdiri dari 4 langkah yaitu: (1) Mengidentifikasi dan menggolongkan biaya ke dalam berbagai aktivitas; (2) Mengklasifikasi aktivitas biaya ke dalam berbagai aktivitas, pada langkah ini biaya digolongkan ke dalam aktivitas yang terdiri dari 4 kategori yaitu *Unit level activity costing*, *Batch related activity costing*, *Product sustaining activity costing*, *Facility sustaining activity costing*; (3) Mengidentifikasi *Cost Driver*, yang merupakan faktor yang dapat menerangkan konsumsi biaya-biaya overhead; (4) Menentukan tarif/unit *Cost Driver*, adalah biaya per unit *Cost Driver* yang dihitung untuk suatu aktivitas. *Unit cost driver* dapat dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Aktivitas}}{\text{Cost Driver}}$$

- 2) Tahap Kedua
 Penelusuran dan pembebanan biaya aktivitas ke masing-masing produk yang menggunakan *cost driver*. Pembebanan biaya overhead dari setiap aktivitas dihitung dengan rumus:

$$\text{Unit cost driver} \times \text{Cost driver yang dipilih}$$

Hasil dari pembebanan biaya overhead setiap aktivitas kemudian dijumlahkan sehingga diperoleh total biaya. Biaya satuan (*unit cost*) dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Biaya}}{\text{Jumlah Siswa}}$$

Rumus tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3. Kisi-kisi Penghitungan Biaya Satuan Pendidikan per Siswa per Program Keahlian

No	Aktivitas	Biaya/ Unit	Cost Driver	Total Biaya
		(a)	(b)	(a x b)
1				
2				
3				
4				
5				
Jumlah Biaya per Program Keahlian				(c)
Jumlah Siswa per Program Keahlian				(d)
Biaya Satuan per Siswa per Program				(c / d)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mengidentifikasi dan menggolongkan biaya ke dalam berbagai aktivitas

Berdasarkan data penelitian, diketahui bahwa aktivitas-aktivitas biaya yang terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan yaitu: (1) Biaya Gaji, termasuk biaya gaji guru dan tenaga pendidikan; (2) Biaya Kegiatan Kesiswaan, meliputi kegiatan OSIS, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pentas seni sekolah dan sebagainya; (3) Biaya Peningkatan Mutu, meliputi kegiatan peningkatan mutu standar isi, standar proses, standar penilaian, standar kompetensi lulusan dan sebagainya; (4) Biaya Administrasi; (5) Biaya Pengembangan Sarana; (6) Biaya Peningkatan Sarana; (7) Biaya Kegiatan Sarana dan Prasarana, meliputi perawatan sarana dan prasarana, pemeliharaan sarana dan prasarana; (8) Biaya Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB); (9) Belanja Modal, meliputi pengadaan komputer dan *speaker* di setiap ruang kelas.

Aktivitas-aktivitas biaya tersebut diklasifikasi aktivitas biaya ke dalam berbagai aktivitas: (1) Berdasarkan *Unit-level activity cost*, Aktivitas ini dilakukan untuk setiap unit produksi. Biaya aktivitas berlevel unit bersifat proporsional dengan jumlah unit

produksi. Aktivitas yang termasuk dalam kategori tersebut adalah aktivitas biaya gaji, biaya kegiatan kesiswaan; (2) Berdasarkan *Batch-related activity cost*, Besar kecilnya biaya ini tergantung dari frekuensi order produksi yang diolah oleh fungsi produksi. Aktivitas ini tergantung pada jumlah batch produk yang diproduksi. Aktivitas yang termasuk dalam kategori ini yaitu biaya peningkatan mutu, biaya administrasi; (3) Berdasarkan *Product-sustaining activity cost*, Aktivitas ini berhubungan dengan penelitian dan pengembangan produk tertentu dan biaya-biaya untuk mempertahankan produk agar tetap dapat dipasarkan. Aktivitas ini tidak ditemui pada perusahaan atau organisasi jasa dalam menentukan biaya satuan; (4) Berdasarkan *Facility-sustaining activity cost*, Aktivitas ini berhubungan dengan kegiatan untuk mempertahankan fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan. Aktivitas yang termasuk dalam kategori ini adalah biaya kegiatan sarana dan prasarana, biaya pengembangan sarana, biaya peningkatan sarana, biaya pembangunan kelas baru, belanja modal.

1. Mengidentifikasi *Cost Driver*

Pengidentifikasi dimaksudkan untuk menentukan kelompok aktivitas dan tarif per unit *cost driver*. Dalam menentukan *driver*, peneliti mempertimbangkan faktor-faktor

berikut: (1) *Cost Driver* jam kerja, peneliti mengasumsikan bahwa penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar berlangsung selama 7 jam sehari; (2) *Cost Driver* jumlah siswa, faktor ini untuk menentukan konversi biaya yang diserap oleh produk (siswa) pada kegiatan proses belajar mengajar; (3) *Cost Driver* jumlah hari, peneliti mengasumsikan bahwa penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar berlangsung selama 6 hari seminggu.

2. Menentukan tarif per unit cost driver

Setelah mengidentifikasi *cost driver*, kemudian menentukan tarif per unit *cost driver*. Tarif per unit *cost driver* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Aktivitas}}{\text{Cost Driver}}$$

Tabel 4. Penentuan Tarif Per Unit Cost Driver

Elemen Biaya	Jumlah (Rp)	Cost Driver	Biaya/Unit (Rp)
<i>Unit-level activity cost</i>			
Gaji Pegawai	4.630.000.000	120.582	38.397
<i>Biaya Kegiatan Kesiswaan</i>			
Peningkatan Mutu	1.104.000.000	1.039	1.062.560
<i>Batch-related activity cost</i>			
Peningkatan Mutu	1.170.150.000	1.039	1.126.227
Biaya Administrasi	13.897.845	594	23.397

<i>Facility-sustaining activity cost</i>			
<i>Kegiatan Sarana dan Prasarana</i>			
Pengembangan Sarana	950.600.000	4.531	209.799
<i>Biaya Peningkatan Sarana</i>			
Pembangunan Ruang Kelas	2.154.546.904	4.531	475.512
<i>Biaya Peningkatan Sarana</i>			
Pembangunan Ruang Kelas	209.546.904	4.531	46.247
<i>Belanja Modal</i>			
Belanja Modal	440.098.425	4.531	97.131
Belanja Modal	12.000.000	4.531	2.648

Sumber : Data yang telah diolah

3. Biaya Satuan Pendidikan Siswa per Angkatan Kelas

Biaya satuan pendidikan siswa SMAN 1 Purwokerto tahun ajaran 2015/2016 berdasarkan angkatan kelas ditampilkan sebagai berikut: (1) Jumlah siswa kelas X adalah 376 siswa dengan total biaya sebesar Rp.3.798.191.315,00 sehingga *biaya* per unit kelas X sebesar Rp.10.101.573,00 per siswa per tahun atau sebesar Rp.967.088,00 per bulan; (2) Jumlah siswa kelas XI adalah 330 siswa dengan total biaya sebesar Rp.3.803.943.881,00 sehingga *biaya* per unit kelas XI sebesar Rp.11.527.103,00 per siswa per tahun atau sebesar Rp.960.592,00 per bulan; (3) Jumlah siswa kelas XI adalah 317 siswa dengan total

biaya sebesar Rp.4.146.342.944,00 sehingga *biaya* per unit kelas XII sebesar Rp.13.079.946,00 per siswa per tahun atau sebesar Rp.1.089.996,00 per bulan.

4. Biaya Satuan Pendidikan Siswa per Program Peminatan

Biaya satuan pendidikan siswa SMAN 1 Purwokerto tahun ajaran 2015/2016 berdasarkan program peminatan ditampilkan sebagai berikut: (1) Jumlah siswa program MIA adalah 871 siswa dengan total biaya sebesar Rp. 5.955.818.988,00 sehingga *biaya* per unit program MIA sebesar Rp.6.837.909,00 per siswa per tahun atau sebesar Rp.569.826,00 per siswa per bulan; (2) Jumlah siswa program Sosial adalah 182 siswa dengan total biaya sebesar Rp.2.981.251.643,00 sehingga *biaya* per unit program Sos sebesar Rp.16.380.504,00 per siswa per tahun atau sebesar Rp.1.365.045,00 per siswa per bulan; (3) Jumlah siswa program MIA-Akselerasi adalah 16 siswa dengan total biaya sebesar Rp.2.485.520.297,00 sehingga *biaya* per unit program keahlian MIA-Akselerasi sebesar Rp.155.345.019,00 per siswa per tahun atau sebesar

Rp.12.945.418,00 per siswa per bulan.

5. Proporsi Alokasi Pendanaan Pendidikan (Partisipasi Masyarakat)

Berdasarkan jumlah *unit cost* siswa per bulan, persentase alokasi pendanaan dari tiap-tiap sumber dana adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Alokasi Sumber Dana Biaya Satuan Pendidikan Per Kelas

Kelas	APBN (15%)	APBD Kabupaten (41%)	Partisipasi Masyarakat (44%)	Jumlah Biaya (Rp)
X	126.270	345.137	370.391	841.798
XI	144.089	393.843	422.660	960.592
XII	163.499	446.898	479.598	1.089.996

Sumber : Data yang telah diolah
 Dari tabel sebelumnya, diketahui bahwa pengalokasian dana untuk Biaya Satuan Pendidikan Per Kelas sebagian besar berasal dari partisipasi masyarakat yaitu Rp.370.391,00 untuk kelas X; Rp.422.660,00 untuk kelas XI; Rp.479.598,00 untuk kelas XI. Jumlah tersebut sangat besar dibandingkan dengan iuran SPP yang ditetapkan oleh sekolah sebesar Rp250.000,00 per bulan untuk masing-masing kelas.

Tabel 6. Alokasi Sumber Dana Biaya Satuan Pendidikan Per Program Peminatan

Program Peminatan	APBN (15%)	APBD Kabupaten (41%)	Partisipasi Masyarakat (44%)	Jumlah Biaya (Rp)
MIA	85.474	233.629	250.723	569.826
Sos	204.756	559.667	600.618	1.365.042
MIA-Aksele rasi	1.941.813	5.307.621	5.695.984	12.945.418

Sumber : Data yang telah diolah

Dari tabel diatas, diketahui bahwa pengalokasian dana untuk Biaya Satuan Pendidikan Per Program sebagian besar berasal dari partisipasi masyarakat yaitu Rp.250.723,00 untuk program MIA; Rp.600.618,00 untuk program Sos; Rp.5.695.984,00 untuk program MIA-Akselerasi . Jumlah tersebut sangat besar dibandingkan dengan iuran SPP yang ditetapkan oleh sekolah khususnya untuk program MIA-Akselerasi sebesar Rp500.000,00 per bulan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Identifikasi aktivitas-aktivitas biaya yang terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan meliputi Biaya Gaji, Biaya Kegiatan Kesiswaan, Biaya Peningkatan Mutu, Biaya Administrasi, Biaya Pengembangan Sarana, Biaya Peningkatan Sarana, Biaya Kegiatan Sarana dan Prasarana,

Biaya Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan Belanja Modal. Pengklasifikasian biaya ke dalam berbagai aktivitas dibagi berdasarkan *unit-level activity cost* (biaya gaji, biaya kegiatan kesiswaan), *batch-related activity cost* (biaya peningkatan mutu, biaya administrasi), serta *facility-sustaining activity cost* (biaya kegiatan sarana, biaya pengembangan sarana, biaya peningkatan sarana, biaya pembangunan kelas baru, belanja modal).

Pengidentifikasian *cost driver* dimaksudkan untuk menentukan kelompok aktivitas dan tarif per unit *cost driver*. Dalam menentukan *driver*, dipertimbangkan faktor-faktor seperti jam kerja, jumlah siswa, dan jumlah hari. Faktor-faktor tersebut untuk menentukan konversi biaya yang diserap oleh produk (siswa) pada kegiatan proses belajar mengajar selama satu tahun ajaran.

Jumlah masing-masing tarif per *unit cost driver* yang telah ditentukan adalah sebagai berikut: (a) Gaji Pegawai Rp38.397/unit; (b) Biaya Kegiatan Kesiswaan Rp1.062.560/unit; (c) Biaya Peningkatan Mutu Rp1.126.227/unit; (d) Biaya Administrasi Rp23.397/unit; (e) Kegiatan Sarana dan Prasarana Rp209.799/unit; (f) Biaya Pengembangan Sarana Rp475.512/unit;

(g) Biaya Peningkatan Sarana Rp46.247/unit; (h) Pembangunan Ruang Kelas Rp97.131/unit; (i) Belanja Modal Rp2.648/unit.

Biaya satuan pendidikan per angkatan kelas dengan menggunakan metode *Activity Based Costing* di SMAN 1 Purwokerto tahun ajaran 2015/2016 adalah siswa kelas X sebesar Rp.10.101.573,00 per tahun dan Rp.841.798,00 per bulan; siswa kelas XI sebesar Rp.11.527.103,00 per tahun dan Rp.960.592,00 per bulan; siswa kelas XII sebesar Rp.13.079.946,00 per tahun dan Rp.1.089.996,00 per bulan.

Biaya satuan pendidikan per program peminatan dengan menggunakan metode *Activity Based Costing* di SMAN 1 Purwokerto tahun ajaran 2015/2016 adalah siswa program MIA sebesar Rp.6.837.909,00 per tahun dan Rp.569.826,00 per bulan; siswa program Sosial sebesar Rp.16.380.504,00 per tahun dan Rp.1.365.042,00 per bulan; siswa program MIA-Akselerasi sebesar Rp.155.345.019,00 per tahun dan Rp.12.945.418,00 per bulan.

Pengalokasian dana untuk Biaya Satuan Pendidikan sebagian besar berasal dari partisipasi masyarakat, yaitu Rp.370.391,00 untuk kelas X; Rp.422.660,00 untuk kelas XI; Rp.479.598,00 untuk kelas XI;

Rp.5.695.984,00 untuk program MIA-Akselerasi. Jumlah tersebut sangat besar dibandingkan dengan iuran SPP yang ditetapkan oleh sekolah yaitu sebesar Rp250.000,00 untuk Kelas X-XI dan Rp500.000,00 untuk program MIA-Akselerasi.

Saran

Sekolah dapat mempertimbangkan perhitungan biaya satuan dengan menggunakan metode *Activity Based Costing* sebagai dasar perencanaan sehingga sekolah dapat mengalokasikan dana yang ada secara tepat.

Perhitungan biaya gaji guru dan karyawan sebaiknya dihitung secara terpisah dan rinci dalam metode *Activity Based Costing* untuk menghasilkan perhitungan yang lebih relevan.

Penelitian berikutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian yang sejenis karena dalam penelitian ini hanya memperhitungkan biaya satuan pendidikan berdasarkan rencana anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Abba Gabrilin. (2014). Anies Baswedan Sebut Pendidikan Indonesia Gawat Darurat. Diambil dari <http://edukasi.kompas.com/read/2>

- 014/12/01/13455441/anies.baswed
an.sebut.pendidikan.indonesia.gaw
at.darurat tanggal 26 Februari
2016
- Anastasia Ide Cahyaningrum. (2015).
Penghitungan Biaya Satuan
Pendidikan SMA Negeri 2
Yogyakarta Tahun Ajaran
2014/2015. *Skripsi*. Tidak
diterbitkan. Universitas Negeri
Yogyakarta.
- Blocher, Edward J. (2000). *Manajemen
Biaya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dedi Supriadi. (2003). *Satuan Biaya
Pendidikan Dasar dan Menengah*.
Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- _____. (2010). *Biaya Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah*.
Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Harsono. (2007). *Pengelolaan
Pembiayaan Pendidikan*.
Yogyakarta: Pustaka Book
Publisher
- Horngren, Charles T. (2008). *Akuntansi
Biaya : Penekanan Manajerial*.
Jakarta: PT.Indeks.
- Indra Bastian. (2007). *Akuntansi
Pendidikan*. Erlangga: Jakarta
- Michael Lee. (2015). Kualitas Pendidikan
Indonesia Peringkat 69 Tingkat
Dunia. Diambil dari
http://www.kompasiana.com/michaellee/kualitas-pendidikan-indonesia-peringkat-69-tingkat-dunia_54f98d58a3331140548b48f8
8 tanggal 26 Februari 2016
- Muljani A Nurhadi. (2011). *Dilema
Kebijakan Pendanaan Pendidikan*.
Yogyakarta: Nurhadi Center
- Mulyadi. (1993). *Akuntansi Manajemen,
Konsep, Manfaat dan Rekayasa*,
Edisi 2, BP STIE YKPN
- _____. (2007). *Activity Based Cost
System*. UPP STIM YKPN:
Yogyakarta
- Mulyasa. (2009). *Manajemen Berbasis
Sekolah (konsep, strategi,
implementasi)*. Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya
- Nanang Fatah.(2008). Pembiayaan
Pendidikan: Landasan Teori dan
Studi Empiris. *Jurnal Pendidikan
Dasar 9*
- _____. (2004). *Landasan Manajemen
Pendidikan*. Remaja Rosdakarya:
Bandung
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 69 Tahun 2009 tentang
Standar Biaya Non Personalia
Tahun 2009 untuk Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah
(SD/MI), Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah
(SMP/MTs), Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah
(SMA/MA), Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar
Luar Biasa (SDLB), Sekolah
Menengah Pertama Luar Biasa
(SMPLB), dan Sekolah Menengah
Atas Luar Biasa (SMALB)
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
2013 tentang Standar Nasional
Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun
2008 tentang Pendanaan
Pendidikan

Petunjuk Teknis (Juknis) BOS SMA
Tahun 2015

Santi Setyaningrum. (2014). Analisis
Perhitungan Biaya Satuan dengan
Model Activity Based Costing
untuk Menentukan Standar Biaya
di SMK Negeri 3 Kota Tangerang
Selatan. *Skripsi*. UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan
Nasional

William K Charter. (2009). *Akuntansi
Biaya*. Jakarta: Salemba Empat

Yan Hanif Jawangga. (2015). Perhitungan
Unit Cost Penyelenggaraan
Pendidikan Program Studi
Pendidikan Akuntansi Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri
Yogyakarta dengan metode
Activity Based Costing. *Skripsi*.
Tidak diterbitkan. Universitas
Negeri Yogyakarta.